

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia* Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ichsan. 1993. *Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Pengangkutan*. Jakarta; Pradnya Paramita.
- Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba. 2022. *Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan*. Jakarta; Kencana.
- Anwar Borahima. 2023. *Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*. Depok; Raja Grafindo Persada.
- Aziz Syamsuddi. 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)*. Jakarta; CV.Nario Sari.
- Chatamarassjid. 2000. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung; Citra Aditya Bhakti.
- _____. 2002. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Chidir Ali. 1991. *Badan Hukum*. Bandung; Alumni.
- Dameria Sinaga. 2014. *Buku ajar Statstik Dasar*. Jakarta Timur; UKI PRESS.
- Habib Adjie. 2022. *Mendalami Seluk Beluk Permasalahan dan Solusi Praktis Pengelolaan Yayasan*. Semarang; Duta Nusindo.
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh. 2016. *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Bandung; Citraaditya Bakti.
- 3 Rai Widjaya. 2005. *Hukum Perusahaan*. Jakarta; Kesaint Blanc.
- atan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta; Dewan Standar Akuntansi Keuangan,



- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Jimly Asshidiqqie. 2010. *Perihal Undang-undang*, Jakarta; Rajagrafindo Persada.
- Kansil, et al. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta; Jala Permata Aksara.
- Mahendra Kurniawan et.al. 2007. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta; Kreasi Total Media.
- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis data Kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta; UI Press.
- Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta; Kanisius.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Mulhadi. 2019. *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Oemar Moechthar. 2019. *Teknik pembuatan akta badan hukum dan badan usaha di Indonesia*. Surabaya; Airlangga University Press.
- P.N.H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta; Kencana.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1993. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana Prenada Media Grup.
- R. Ali Rido. 1977. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung; Alumni.



ochmat Soemitro. 1989. *Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usahanya*. Jakarta; Gramedia.

atjipto Rahardjo, 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti.

- Soejono Soekamto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UI Press.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta; Liberty.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kombinasi (mixed methods)*, Bandung; Alfabeta.
- Titik Triwulan Tutik, 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta; Kencana.
- Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*. Bandung; Refika Aditama.
- Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. 2020. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta; Kencana. (Hal 25)

Jurnal

- Al Araaf Ode Pota, A. Suryaman M. Pide, Sri Susyanti Nur. 2022. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa*. Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum. Vol. 4 No. 2.
- Dewi Suci Ramadhani, Winarno Budyatmojo. 2022, *Tinjauan Teori Perundang-undangan Terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK*. Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional Universitas Sebelas Maret. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Vol 1 No. 2.
- Emy Widya. Paramita Prananingtyas, Budi Ispriyarso. 2019. *Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang*. NOTARIUS, Vol 12 No. 1.
- Hasnati, et al. 2021. *Penyuluhan Hukum Mengenai Bentuk-Bentuk Badan Usaha Bagi UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Kepada Anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekan Baru*. Ensiklopedia Research and Community Service Review, Volume 1 Nomor 1.



- Muhammad Aswan, Yulfira Briliyanti Ramdani, Abdul Razak. 2023. *Implementasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Gorontalo Law Review, Vol. 6, No. 1.
- Muhammad Arya Azzurba, Anwar Borahima, Winner Sitorus. 2023. *Keabsahan Akta Penegasan dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan*. Jurnal Ilmu Sosial. Vol. 3, No. 3.
- Okky Deviany, Andi Suci Wahyuni, dan Amiroh Alifiani. 2024. *Legal Aspects of The Process of Forming A State-Owned Enterprise Holding Company Industrial Estate Cluster*. Vol. 1, No. 1. hlm. 42.
- Pradono Tri Pamungkas P, Maria M. Minarsih, Aziz Fathoni. 2015 pengaruh modal, *kualitas sumber daya manusia dan promosi terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran)*, Jurnal of Management, Vol. 1 No. 1.
- Zulkifli Aspan, Aminuddin Ilmar, dan Nurjannah. 2018. *Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris*. Riau Law Journal. Vol. 2, No. 2.

Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia.



Artikel dan Sumber Internet

<https://sikeran.bphn.go.id/>. diakses pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 pada pukul 15:10.

<https://dpmpptsp.cianjurkab.go.id/post/read/202/daftar-lengkap-kode-kbli-yang-bisa-digunakan-untuk-izin-usaha-perdagangan-di-oss.html>. diakses pada tanggal 17 November 2023 pada pukul 15.25 WIB.

<https://pelaporan.fofo.go.id/fpublikasi/detail/4>. diakses pada tanggal 17 November 2023 pada pukul 15.46 WIB.

<https://ini.id/post/nomor-induk-berusaha-nib-berfungsi-sebagai-siup-tdp-api-dan-kepabenenan>. diakses pada tanggal 17 November tahun 2023 pada pukul 15.49 WIB.

<https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/2/>, Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia, diunggah pada 12 Maret 2021, diakses pada tanggal 17 November 2023.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-danpuu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>. A.A. Oka Mahendra. 2010. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Diakses pada tanggal 17 November 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/usaha>. Kamus Besar Bahasa Indonesia Diakses pada 28 mei 2024 pukul 14.21.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/badan%20usaha>. Kamus Besar Bahasa Indonesia Diakses pada 28 mei 2024 pukul 15.00.

https://bphn.go.id/data/documents/komp_2012_yayasan.pdf. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI. 2012. *Kompendium Hukum Yayasan*. diakses pada 29 Mei 2024 pukul 15.42 WITA.

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/6306>. Dhimas Hadi Candra. 2013. diakses pada 01 Juni 2024 pada pukul 16.43.

<tps://www.djkn.kemenkeu.go.id>. Garry Fischer Silitonga. 2022. *Artikel Asas lex superior derogate legi inferiori dan kedudukan surat edaran dalam perundang-undangan*. diakses di pada tanggal 03 juni 2024 pukul 17.44.



<https://dpmptspintanjaya.com/Perizinan/izin>. *Informasi Surat Izin Tempat Usaha*. diakses pada 10 Juni 2024 pukul 13.49 WITA.

<https://www.kominfo.go.id>. Berita Pemerintahan, *Inilah PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. diakses pada 10 Juni 2024 pukul 10.51.

<https://setkab.go.id/>. 2015. Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?*. Diakses pada 10 Juni 2024 pukul 15.08 WITA.

| Diakses melalui <https://oss.go.id> pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 13.00 WITA.

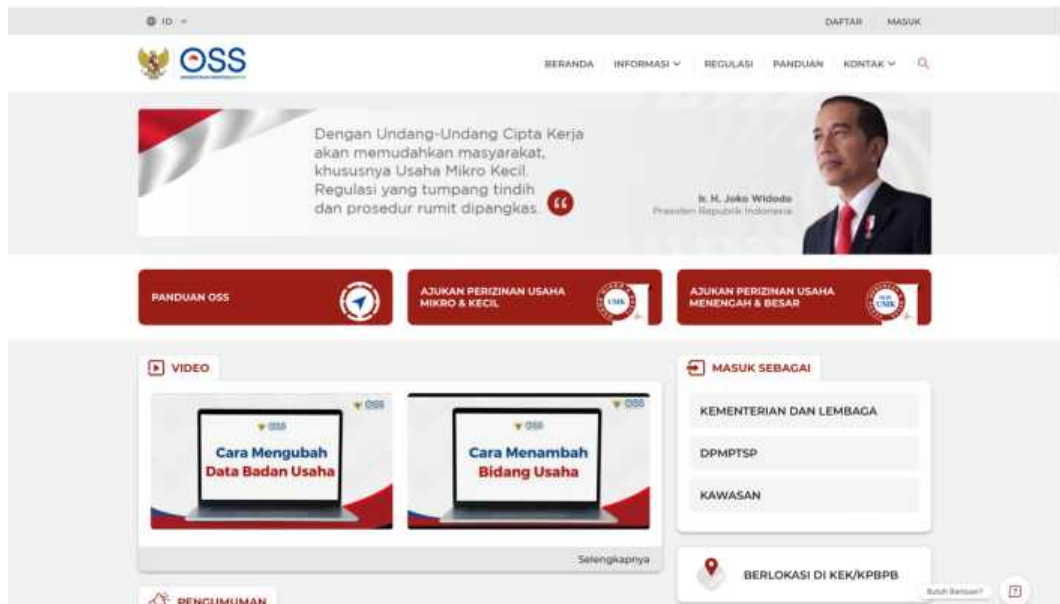


LAMPIRAN



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Gambar 1. Tahap Pertama Pembuatan Akun Oss



Gambar 2. Tahap Pengisian data untuk Pendaftaran Akun OSS

ui-login.oss.go.id

OSS
ANALISIS KUALITAS

Pendaftaran Akun

1 2 3 4
Skala Usaha Verifikasi Data Kata Sandi Profil Pelaku Usaha

Pilih Skala Usaha

UMK 1

Modal usaha ≤ Rp5 miliar
Untuk usaha orang perseorangan atau badan usaha milik WNI dengan modal maksimal Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan).

Non UMK 1

Modal usaha > Rp5 miliar
Untuk usaha orang perseorangan atau badan usaha dengan modal awal lebih dari Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan).

Lanjut

Sudah punya akun? [Masuk](#)



Gambar 3. Tahap Akhir mendaftar Akun OSS

U-Login OSS

Nama Lengkap
Masukkan nama sesuai KTP

Jabatan
Masukkan jabatan direksi atau pengurus

Jenis Kelamin
☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Tanggal Lahir
dd/mm/yyyy

Alamat
Contoh: Jl. RUSA 1

Isi alamat **tanpa** menyertakan RT/RW dan kode pos

Provinsi
Pilih provinsi

Kabupaten/Kota
Pilih kabupaten/kota

Kecamatan
Pilih kecamatan

Desa/Kelurahan
Pilih desa/kelurahan

☐ Saya setuju dengan **Syarat dan Ketentuan** serta **Kebijakan Privasi** yang berlaku di Lembaga OSS-Kementerian Investasi/BKPM.

Daftar

Gambar 4. Tahap Awal Permohonan NIB



Gambar 5. Tahap Pengisian Data Badan Usaha

Gambar 6. Tahap Pengisian Detail usaha sesuai dengan KBLI 2020



Gambar 7. Tahap pengisian pertanyaan seputar perusahaan

OSS BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN

UUUUUUUUU
Total Nilai Investasi : Rp
268.000.000
Luas Lahan : 86 M²

Item Per Halaman: 10

AKTIVITAS IMPOR

Apakah perusahaan Anda akan melakukan impor barang sendiri? Tidak

DATA PENDAFTARAN BPJS

Apakah perusahaan Anda memiliki Nomor Virtual Account (BPJS Kesehatan)?

Gambar 8. Tahap Proses Perizinan Berusaha

OSS BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN

1	85132	Tanah : Rp 43.000.000 Bangunan Gedung : Rp 200.000.000 Mesin / Peralatan Dalam Negeri : Rp 0 Mesin / Peralatan Impor : Rp 0 Investasi Lain - Lain : Rp 15.000.000 Modal Kerja 3 Bulan : Rp 10.000.000 Total Nilai Investasi : Rp 268.000.000 Luas Lahan : 86 M² Jenis Kegiatan Usaha : Utama	Usaha Mikro	Tinggi	-	-
---	-------	--	-------------	--------	---	---

Proses Perizinan Berusaha

Item Per Halaman: 10



Gambar 9. Tahap pengisian pernyataan mandiri

PERNYATAAN MANDIRI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha: _____
 Nomor Induk Berusaha (NIB): _____

MENJAGA KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN (K3L)

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut

☐ Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KESEDIAAN MEMENUHI PERSYARATAN IZIN

Gambar 10. Tahap Penerbitan Perizinan Berusaha

1 / 3
86%



1

Informasi Umum Izin

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor

No. Telpun : _____
 Email : _____
 3. Status Pemohonan Izin : _____
 4. Nomor Klasifikasi Risiko Lingkungan Usaha Industri : _____
 5. Status Usaha : _____

NIB ini berlaku 10 tahun, kecuali jika ada perubahan regulasi yang mengharuskan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan lain selain kegiatan yang terdapat dalam NIB ini, maka pelaku usaha harus melakukan kegiatan lain tersebut.

Pelaku Usaha dengan NIB terdapat di sini dapat melakukan kegiatan lain yang terdapat dalam NIB ini dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam NIB ini.

Ditandatangani dan disahkan oleh:

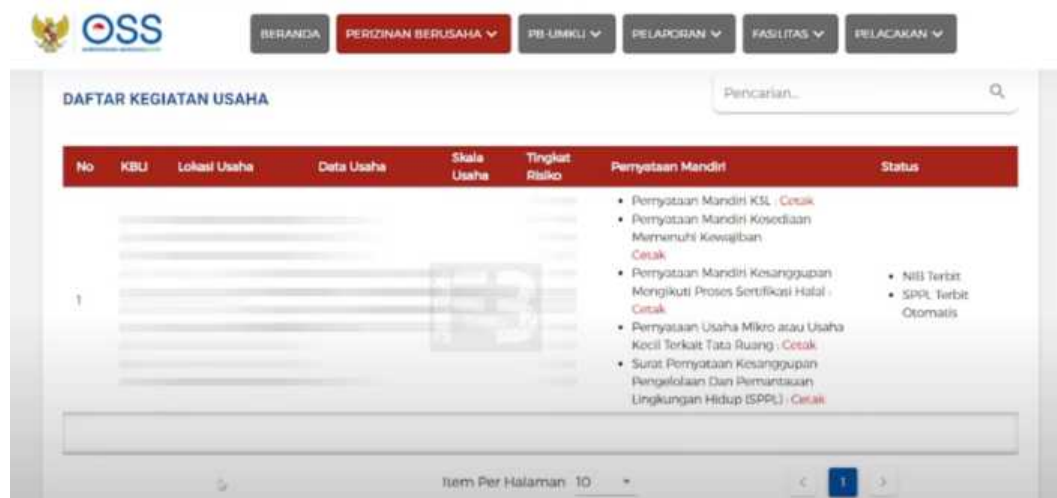
Berkas Izin (Draft)
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

☒ Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut

Tutup
Terbitkan Perizinan Berusaha



Gambar 11. Contoh Nomor Induk Berusaha yang telah terbit



No	KBLU	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1						- Pernyataan Mandiri KSL : <i>Cetak</i> - Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Kewajiban : <i>Cetak</i> - Pernyataan Mandiri Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal : <i>Cetak</i> - Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang : <i>Cetak</i> - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) : <i>Cetak</i>	- NIB Terbit - SPPL Terbit Otomatis

Gambar 12. Wawancara dengan KemenkumHAM Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 13. Wawancara dengan Notaris Abdurrifai



Gambar 14. Wawancara dengan Notaris Niny Savitry



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Gambar 15. Wawancara dengan Notaris Sukwanto Tandi



Gambar 16. Wawancara dengan Notaris Rasyida Usman.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Gambar 17. Wawancara dengan Notaris Huswan Husain.



Gambar 18. Wawancara dengan Notaris Hustam Husain.



Gambar 19. Wawancara dengan Notaris Eka Suci Mauliyani



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Gambar 20. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari instansi KemenkumHAM

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 85431 Faksimili (0411) 871160
Laman: <https://sulsel.kemenkumham.go.id/>

25 April 2024

SURAT KETERANGAN
Nomor : W23 - UM.01.01- 298

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: Vinska Villary Wongkar
NIM	: B022221026
Program Studi	: Magister (S2) Kenotariatan
Pekerjaan	: Mahasiswa (S2)

Benar telah melakukan Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 1149/UN4.5.1/TD.06/2024 Tanggal 21 Maret 2024, dengan Judul Tesis " **Kepastian Hukum Nomor Induk Berusaha Pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Dalam Menjalankan Kegiatan Yayasan** " terhitung mulai Bulan Maret 2024 sampai Selesai.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

a.n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi
u.b Kepala Bagian Umum,

Basir, SH., MH.
NIP 197211111993031001



Scanned with CamScanner



Gambar 21. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari instansi Kesbangpol

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
MAKASSAR 90231

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/776-0/kesbang

Yang bertanda tangan dibawah ini Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VINSKA VILLARY WONGKAR
Nomor Pokok : B022221026
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswa S2 Fakultas Hukum
Program Study : Kenotariatan
Kampus : Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10 Makassar

Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 02 s/d 31 Mei 2024

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Makassar 31 Mei 2024
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

ANSYAR, S.STP., M. AP
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19791205 199810 1 002



Gambar 22. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari instansi DMPTSP

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Bougenville No. 05 Telp. (0411) 441532, 440151 Fax (0411) 450560
MAKASSAR 90231

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 000-9 / 1435 / DPMPTSP

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : A.AGIV SATRIAWAN ALIMUDDIN, S.STP.
Nip : 19850629 200602 1 001
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Prov.Sul Sel

Menerangkan bahwa:

Nama : VINSKA VILLARY WONGKAR
Nomor Pokok : B022221026
Program Studi : Kenotariatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl.P.Kemerdekaan KM 10,Makassar

Dengan ini menyatakan yang sebenar benarnya bahwa mahasiswa tersebut pernah melakukan Penelitian pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 26 April s/d 26 Juli 2024, dengan judul :
" KEPASTIAN HUKUM NOMOR INDUK BERUSAHA PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 DALAM MENJALANKAN KEGIATAN YAYASAN "

Demikian surat keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal : 11 Juni 2024
An. Kepala DPMPTSP Prov.SulSel
Sekretaris


A.AGIV SATRIAWAN ALIMUDDIN, S.STP
Pangkat : Pembina
NIP. 19850629 200602 1 001

Tembusan :

1. Universitas Hasanuddin (UNHAS)
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.



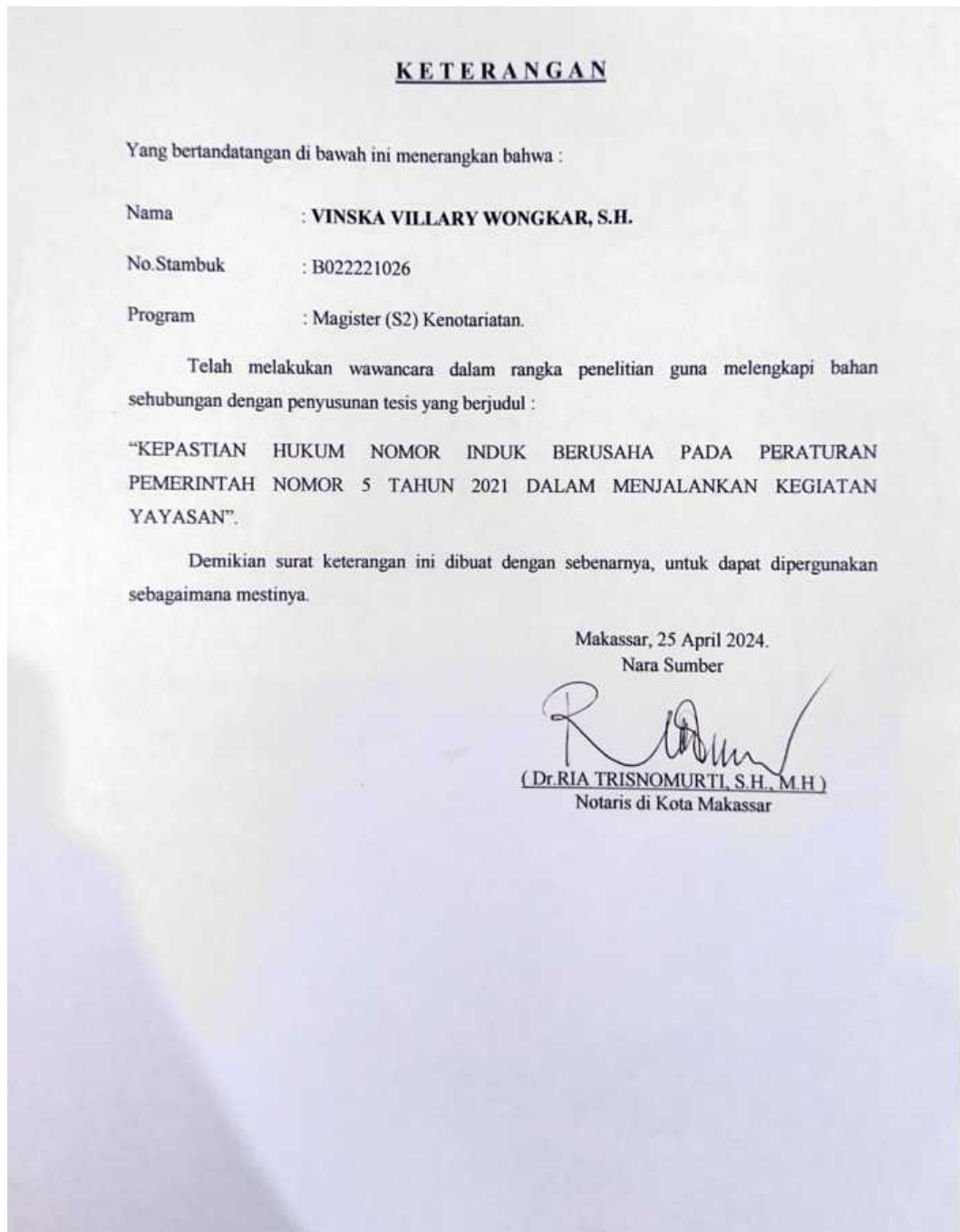
Gambar 23. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Notaris Sukwanto Tandi



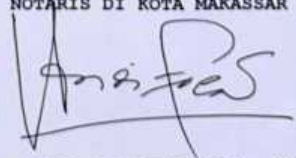
Gambar 24. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Notaris Niny Savitry



Gambar 25. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Notaris Ria Trisnomurti



Gambar 26. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Notaris A. Lola Rosalina

A. LOLA ROSALINA, S.H., M.H. NOTARIS/PPAT Jalan Letjen Hertaning, Kompleks Palm Mas No 3, Kota Makassar Telp +62811441806 Email : lolarosalina27@yahoo.co.id, : lolarosalina27@gmail.com		SK MENTERI KEHAKIMAN RI No.C-109.TH.03.01-TH. 1994 Tanggal 13 Juli 1994 SK MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor : 3 - XI - 1996 Tanggal : 4 Maret 1996
Nomor : 16/2024 Hal : Surat Keterangan Lampiran : -		
<u>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</u>		
-Yang bertanda tangan di bawah ini:		
LOLA ROSALINA, SH, MH. Notaris/PPAT di Kota Makassar		
-Menerangkan dengan ini bahwa : -----		
Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah Kota Makassar Ikatan Notaris Indonesia (INI) ----- Nomor : 49/U/01-IV/PengwilSulsel-INI/2024 tertanggal 01 April 2024, atas : -----		
Nama Nomor Pokok Program Studi Judul	: VINSKA VILLARY WONGKAR : B022221026 : Magister (S2) Kenotariatan : KEPASTIAN HUKUM NOMOR INDUK BERUSAHA PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 DALAM MENJALANKAN KEGIATAN YAYASAN	
Benar telah melakukan penelitian di Kantor saya, LOLA ROSALINA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Makassar.-----		
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-----		
Makassar, 06 Mei 2024 NOTARIS DI KOTA MAKASSAR  (A. LOLA ROSALINA, S.H., M.H)		



Gambar 27. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Notaris Hustam Husain


NOTARIS
HUSTAM HUSAIN, SH.
SK. MEN. HUM & HAM RI NO. : C-05.HT.03.02 Th. 2005,
Tanggal, 21-12-2005
Jl. Boulevard, Ruko Topaz F.17 Panakkukang Mas, Makassar 90222
Telp. 0411-434477, 434077, Fax. 0411-438377

SURAT KETERANGAN
Nomor: 55/HH/VI/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **HUSTAM HUSAIN, SH**
Jabatan : Notaris dan PPAT di Kota Makassar.

Sehubungan dengan surat yang dikeluarkan oleh a.n Dekan Wakil Dekan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, tertanggal 26 Maret 2024, Nomor: 1225/UN4.5.1/PT.01.04/2024, dan sehubungan dengan Surat dari Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan Ikatan Notaris Indonesia tertanggal 01 April 2024 Nomor: 49/U/01-IV/PengwilSulsel-
INI/2024 perihal permohonan izin penelitian, kepada :

Nama : **VINSKA VILLARY WONGKAR, SH.**
Nomor Pokok : B022221026
Program Studi : Magister (S2) Kenotariaran
Judul Tesis : **KEPASTIAN HUKUM NOMOR INDUK BERUSAHA
PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN
2021 DALAM MENJALANKAN KEGIATAN YAYASAN.**

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian pada kantor saya,
Notaris/PPAT Kota Makassar yang berhubungan dengan judul tesis tersebut.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana semestinya.

Makassar, 11 Juni 2024
Notaris di Makassar

(HUSTAM HUSAIN,SH)

